

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR BAGAN.....	13
DAFTAR SINGKATAN.....	14
ABSTRACT	15
INTISARI	16
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Kegunaan Penelitian.....	25
E. Keaslian Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Negara Kesatuan	29
B. Konsep Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan.....	31
C. Penyelenggaraan Desentralisasi di Indonesia	33
D. Pemerintahan Daerah	34
E. <i>Local Government</i>	41
F. Kelurahan	43
G. Desa.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Sifat penelitian.....	43
B. Tipe Penelitian.....	44

C.	Bahan Penelitian.....	45
D.	Teknik dan Alat Pengumpulan Data	48
E.	Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		52
A.	Pengaturan Kelembagaan Kelurahan dan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	52
1.	Pengaturan Kelembagaan Kelurahan Pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	55
2.	Pengaturan Kelembagaan Desa Pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	66
3.	Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Kelembagaan Kelurahan dan Desa.....	88
B.	Konsekuensi Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa dan Desa Menjadi Kelurahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	101
1.	Penataan Kelurahan dan Desa	103
2.	Motif Perubahan Status.....	110
3.	Implikasi Perubahan Status.....	117
BAB V PENUTUP		122
A.	Kesimpulan.....	122
B.	Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA		127
A.	Buku	127
B.	Hasil Penelitian	129
C.	Artikel Jurnal.....	130
D.	Makalah.....	130
E.	Artikel Internet	130
F.	Peraturan Perundang-Undangan.....	131
G.	Putusan Badan Peradilan	133
H.	Lain-Lain.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perbedaan Otonomi Desa dan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974.....	71
-----------	--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Rentang Pengertian <i>Local Government</i> dalam Terminologi Indonesia	42
Bagan 4.1	Hierarki Administratif Pemerintahan Lokal Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa	93
Bagan 4.2	Hierarki Administratif Pemerintahan Lokal Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	94
Bagan 4.3	Mekanisme Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.....	110

DAFTAR SINGKATAN

APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia